

# PERBANDINGAN LEMBAGA HUKUM PERWALIAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DENGAN KETENTUAN HUKUM ADAT

Oleh: Sulastriono

## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Setiap orang dalam hidup bermasyarakat tentu mempunyai cita-cita yaitu hidup bahagia lahir dan batin. Demikian juga dalam kehidupan suatu keluarga tentu mendambakan suasana hidup yang harmonis, bahagia lahir dan batin. Hal ini sesuai pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu cita-cita tentu tidak selamanya berjalan mulus, seperti yang diharapkan. Berbagai cobaan datang tanpa mengenal waktu dan tempat. Kadang-kadang suatu keluarga yang sudah lama hidup bahagia, tiba-tiba datang suatu cobaan hidup yang mengakibatkan kegoncangan.

Berbagai cobaan dalam suatu keluarga itu antara lain: Orang tua bercerai, salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia, kekuasaan orang tua terhadap anak dicabut oleh Hakim melalui keputusan pengadilan.

Akibat dari kejadian-kejadian

di atas adalah kehidupan serta perhatian keluarga terhadap anak, pada umumnya menjadi berkurang. Agar kehidupan anak tidak menjadi terlanjur, maka diperlukan suatu lembaga hukum yang mampu menjamin kehidupan anak. Lembaga hukum tersebut adalah "Perwalian".

Tentang istilah lembaga hukum perwalian ini dapat kita temukan dalam pasal 50-54 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Sedangkan dalam sistem hukum adat istilah perwalian lebih dikenal dengan pemeliharaan anak yatim/piatu. Menurut Hilman Hadikusuma disebut penguasaan anak dan perwalian (Hilman Hadikusuma, 1987:87).

Walaupun istilah perwalian dalam sistem hukum adat berbeda dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tetapi pada prinsipnya mempunyai makna yang sama, yaitu *memelihara atau mengurus anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, termasuk juga terhadap harta benda anak tersebut*. Agar memudahkan dalam pembahasan selanjutnya, maka penulis cenderung untuk menggunakan istilah "Perwalian" seperti telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nasional kita.

## 2. Permasalahan

Dari keterangan tersebut di atas, terdapat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut: "Apakah pengaturan tentang perwalian menurut ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut telah menampung aspirasi masyarakat".

## 3. Tujuan

Dalam menyajikan artikel ini penulis mempunyai tujuan yaitu ingin membandingkan seluk-beluk tentang perwalian, yang meliputi persamaan dan perbedaan dari lembaga hukum perwalian menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan ketentuan hukum adat. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengetahuan dan cakrawala ilmu hukum, khususnya tentang lembaga hukum perwalian.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Perwalian

Lembaga hukum perwalian dirasa penting dan bermanfaat demi kelanjutan kehidupan anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Tentang pengertian perwalian ini, dapat disimpulkan dari pasal 50 ayat 1 dan 2. Dalam ayat 1 mengatur tentang golongan anak yang berada di bawah kekuasaan wali, yaitu: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang

tua, berada di bawah kekuasaan wali". Sedangkan pasal 50 ayat 2 mengatur tentang ruang lingkup perwalian, yaitu: "Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya".

Dalam berbagai bahan bacaan hukum adat pun pengertian perwalian tidak ditemukan suatu ketentuan yang tegas, tetapi hanya ditemukan istilah yaitu:

- Memelihara anak piatu (Surojo Wignjodipuro, 1971:140; Bushar Muhammad, 1983:16)
- Pemeliharaan anak-anak piatu (Ter Haar, 1983:180)
- Pemeliharaan anak yatim/piatu (Iman Sudiyat, 1981:101)
- Pengurusan dan perwalian anak (Hilman Hadikusuma, 1987:87)

Walaupun pengertian tentang perwalian ini tidak ada ketentuan yang tegas, tetapi tidak berarti bahwa hukum adat tidak mengenal perwalian (Hilman Hadikusuma, 1987:87).

Dari uraian di atas dapat dirangkum bahwa:

- Perwalian ditujukan kepada anak-anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.
- Anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tua disebabkan oleh kedua orang tua meninggal dunia atau karena kekuasaan orang tua terhadap satu anak atau lebih dalam waktu tertentu dicabut oleh keputusan hakim.
- Ruang lingkup perwalian meliputi pribadi anak dan harta bendanya.

## 2. Sebab-sebab dan Mulainya Tugas Perwalian

### a. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974

Dari ketentuan pasal 50 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa perwalian disebabkan oleh suatu keadaan yaitu karena anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Ada pun penyebab si anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, yaitu:

- 1). Kekuasaan orang tua atau wali dicabut oleh keputusan hakim (pasal 49 Undang-undang nomor 1 tahun 1974)
- 2). Orang tua meninggal dunia (pasal 51 ayat 1)

Setelah diketahui sebab-sebab terjadinya perwalian, maka selanjutnya perlu diketahui tentang saat mulainya suatu tugas perwalian. Dari beberapa pasal Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa terhadap perwalian yang disebabkan oleh kekuasaan orang tua/wali dicabut oleh keputusan hakim, maka tugas perwalian dimulai sejak adanya penunjukan wali oleh keputusan hakim (pasal 49 Undang-undang nomor 1 tahun 1974). Sedangkan terhadap perwalian karena orang tua meninggal dunia, maka tugas perwalian dimulai sejak ada penunjukan, yaitu setelah orang tua si anak tersebut meninggal dunia.

### b. Menurut Ketentuan Hukum Adat

Dalam ketentuan hukum adat, perceraian orang tua dan meninggalnya salah satu dari orang tua si anak, tidak mengakibatkan kekuasaan orang tua berakhir. Dalam hal ini kekuasaan orang tua diteruskan oleh salah satu dari orang tua yang ada. Perwalian muncul jika kedua orang tua meninggal dunia.

Oleh karena anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, maka selanjutnya anak berada di bawah kekuasaan wali. Tentang mulainya suatu tugas perwalian, menurut ketentuan hukum adat adalah setelah ada penunjukan, baik secara lisan, dengan surat wasiat atau dengan keputusan hakim.

Dari uraian di atas, tampak ada persamaan tentang sebab-sebab terjadinya perwalian. Baik Undang-undang nomor 1 tahun 1974 maupun hukum adat menjelaskan bahwa perwalian disebabkan oleh keadaan yaitu anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Adapun letak perbedaannya adalah bahwa Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenal pencabutan kekuasaan orang tua, sedangkan dalam hukum adat tidak mengenal pencabutan kekuasaan orang tua.

Adapun latar belakang pemikiran adanya ketentuan tentang pencabutan kekuasaan orang tua/wali dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah perkembangan

dari sifat kodrat manusia. Setiap manusia mempunyai sifat yang tidak terpuji antara lain suka berfoya-foya, berkelakuan buruk, lupa tanggung jawab, masa bodoh terhadap anak dan sebagainya. Oleh karena itu, agar kekuasaan orang tua/wali tidak disalah-gunakan, perlu upaya preventif maupun represif. Sebagai realisasi upaya tersebut yaitu dengan mencantumkan ketentuan tentang pencabutan kekuasaan orang tua/wali di dalam pasal 49 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Jadi ketentuan tentang pencabutan kekuasaan orang tua/wali tersebut, tidak menyimpang dari ketentuan hukum adat. Akan tetapi justru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

## 3. Cara Penunjukan Wali

### a. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974

Penunjukan wali dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dapat disimpulkan dari pasal 51 dan 53. Dalam pasal 51: "Perwalian yang ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi". Sedangkan ketentuan pasal 53 ayat 2: "Dalam hal kekuasaan seorang wali, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini oleh pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali".

Jadi cara penunjukan wali dibedakan:

- 1). Perwalian dengan surat wasiat

- 2). Perwalian dengan lisan
- 3). Perwalian dengan keputusan hakim

### b. Menurut ketentuan hukum adat

Dalam ketentuan hukum adat penunjukan wali dibedakan menjadi 3 yaitu secara lisan, dengan surat wasiat dan dengan keputusan hakim.

1. Penunjukan wali secara lisan.

Penunjukan wali secara lisan dibedakan menjadi dua yaitu penunjukan yang dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia dan sesudah orang tua meninggal dunia. Dalam hukum adat jika ada orang yang menderita sakit keras, pada hal masih punya anak kecil-kecil, biasanya pada saat-saat terakhir menjelang ajalnya, lalu memberikan pesan-pesan secara lisan kepada para penunggu. Berbagai pesan lisan itu antara lain penunjukan wali atas anak-anaknya. Akan tetapi apabila sebelum meninggal orang tua tidak sempat menunjuk seorang wali, maka penunjukan seorang wali secara lisan dapat dilakukan setelah orang tua meninggal dunia. Dalam hal ini penunjukan wali dilakukan oleh kerabat si anak dalam suatu musyawarah.

Dalam melakukan musyawarah untuk penunjukan wali biasanya dihadiri juga oleh tokoh/tetua masyarakat. Kehadiran tokoh/tetua masyarakat tersebut adalah sebagai saksi. Selain itu dari pemikiran tokoh masyarakat diharapkan dapat membantu lancarnya musyawarah. Hal ini karena tokoh masyarakat

adalah sebagai orang tua yang bijaksana, dari masyarakat.

Penunjukkan wali secara lisan adalah suatu cara yang paling mudah, sederhana dan dapat dilakukan oleh setiap orang. Oleh karena itu cara inilah yang umum dilakukan di dalam masyarakat.

## 2. Penunjukkan wali dengan surat wasiat

Selain penunjukkan wali secara lisan, dalam hukum adat juga dikenal adanya penunjukkan wali dengan surat wasiat. Adapun mengenai prosedur/tata caranya adalah sebagai berikut: pada waktu orang tua masih hidup membuat surat wasiat tentang penunjukan wali atas anak-anaknya. Pembuatan surat wasiat dapat dilakukan sendiri atau dengan bantuan notaris. Setelah surat ditandatangani oleh para fihak, lalu disimpan oleh notaris. Sedangkan petikannya untuk yang bersangkutan sebagai tanda bukti yang kuat. Cara ini banyak menyita waktu, tenaga dan biaya. Oleh karena itu tak begitu diminati dan jarang digunakan.

## 3. Penunjukkan wali dengan keputusan hakim

Dalam hukum adat penunjukkan wali dengan keputusan hakim dilaksanakan sebagai upaya terakhir jika:

- timbul kesulitan mengenai hal itu
- tidak ada seorang pun yang bersedia
- ada yang bersedia, namun tidak

cakap/memadai (Bab II Ordonantie S. 1931-53) Iman Sudiyat, 1981:100)

Jika dibandingkan antara kedua cara penunjukkan wali di atas, maka terdapat persamaan dan perbedaan. Letak persamaannya adalah kedua ketentuan itu mengenal 3 cara dalam penunjukkan wali. Sedangkan letak perbedaannya adalah dalam hal cara penunjukkan wali melalui keputusan hakim. Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974, cara penunjukkan wali melalui keputusan hakim dilaksanakan, jika kekuasaan orang tua atau wali dicabut oleh keputusan hakim. Sedangkan menurut ketentuan hukum adat, cara penunjukkan wali dengan keputusan hakim dilaksanakan, jika timbul kesulitan dalam penunjukkan wali atau tidak ada orang yang bersedia atau ada orang yang bersedia tetapi tidak cakap. Dengan lain perkataan dalam sistem hukum adat, pelaksanaan penunjukkan wali melalui keputusan hakim merupakan upaya terakhir, berhubungan upaya yang lain sudah tidak mungkin.

## 4. Orang yang Dapat Ditunjuk sebagai Wali

### a. Menurut ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974

Tentang orang yang dapat ditunjuk sebagai wali, ditentukan dalam pasal 51 ayat 2 yaitu: "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran se-

hat, adil, jujur dan berkelakuan baik".

Dari ketentuan yang singkat dan padat tersebut di atas, sebenarnya diperlukan penjelasan lebih lanjut. Tetapi dalam penjelasan pasal demi pasal hanya terdapat kata penjelasan "cukup jelas". Oleh karena itu, perlu penjelasan lebih lanjut agar diperoleh gambaran yang benar.

Selain mengatur tentang penunjukan wali, ketentuan pasal 51 ayat 2 ini, juga mengatur tentang keutamaan dan kriteria wali. Adapun yang diutamakan sebagai wali adalah orang yang berasal dari keluarga si anak. Ada dua pengertian tentang keluarga yaitu keluarga dalam arti sempit dan keluarga dalam arti luas. Keluarga dalam arti sempit (nuclear family) yaitu: "Kebulatan kemasyarakatan yg organisasinya/peragaannya berdasarkan atas perdjodohan jang sjah" (Djojodigono, 1957:95). Keluarga ini beranggotakan seorang suami, seorang istri dan idealnya ditambah dengan beberapa anak. Sedangkan keluarga dalam arti luas (Extended family) terdiri dari keluarga dalam arti sempit ditambah dengan orang-orang yang masih ada hubungan darah seperti: kakek, nenek dari fihak ayah dan ibu, paman dari fihak ayah dan ibu dan sebagainya. Dengan demikian yang dimaksud dengan keluarga dalam pasal 51 ayat 2 tersebut adalah pengertian keluarga dalam arti luas. Selanjutnya urutan keutamaan yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah: kakak, kakek dari

fihak ayah dan ibu, serta paman dari fihak ayah dan ibu. Semua itu harus memenuhi kriteria yang ditentukan yaitu: dewasa, berpikiran, sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Jika ternyata dari fihak keluarga tidak berhasil menunjuk salah satu anggota keluarga sebagai wali karena tidak ada yang memenuhi persyaratan, maka barulah orang lain tampil sebagai wali berdasarkan keputusan hakim. Orang lain yang ditunjuk sebagai wali itupun harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

### b. Menurut ketentuan hukum adat

Tentang orang yang ditunjuk sebagai wali dalam hukum adat, ketentuannya berbeda-beda sesuai dengan sistem kemasyarakatan yang ada.

#### 1). Pada masyarakat Parental

Di Jawa dan Madura, kedudukan suami dengan istri adalah seimbang. Hal ini merupakan akibat dari pelaksanaan bentuk perkawinan mentas. Dengan demikian ayah dan ibu mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memelihara dan membesarkan anak-anaknya. Jika salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka pemeliharaan anak dilanjutkan oleh orang tua yang masih hidup. Sebagai contoh jika ayah meninggal dunia, maka pemeliharaan anak dilanjutkan oleh fihak ibu. Begitu juga sebaliknya jika ibu yang meninggal dunia lebih dahulu, maka ayah akan meneruskan kekuasaan orang tua untuk memelihara dan

membesarkan anak-anaknya. Perlu ditekankan bahwa dalam hal pemeliharaan anak yang dilakukan oleh salah satu dari orang tua yang hidup terlama tersebut, bukan sebagai wali. Akan tetapi ia tetap berstatus sebagai orang tua. Dalam hal ini perwalian muncul, jika kedua orang tua meninggal dunia.

Adapun orang yang dapat ditunjuk sebagai wali menurut hukum adat dalam masyarakat yang bersifat parental, seperti di Jawa dan Madura, diutamakan orang-orang yang berasal dari anggota keluarga atau kerabat si anak. Mereka itu adalah kakak, kakek-nenek dan paman dari fihak ayah atau ibu. Jika hal itu tidak memungkinkan, maka orang lain yang ditunjuk sebagai wali.

Biasanya orang yang ditunjuk sebagai wali pertama kali adalah kakek dari fihak ayah atau ibu. Jika kakek sudah tua, sehingga tak dapat menjadi wali, maka kakak dari anak tersebut dapat ditunjuk sebagai wali. Baik kakak laki-laki maupun kakak perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama untuk menjadi wali atas adik-adiknya. Oleh karena itu, jika jumlah anak yang harus diletakkan di bawah perwalian lebih dari satu, maka biasanya diadakan pembagian tugas perwalian. Sebagai contoh kakak perempuan menjadi wali dari adik laki-laki dan kakak laki-laki menjadi wali kakak perempuan. Atau pun sebaliknya kakak perempuan menjadi wali dari adik perempuan sedangkan kakak laki-laki menjadi

wali dari adik laki-laki.

Lain halnya jika kakak-kakak yang ada tidak dapat menjadi wali karena telah mempunyai banyak anak yang masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang, maka paman dapat ditunjuk sebagai wali. Yang perlu mendapat perhatian adalah kepentingan anak. Jika dirasakan anak lebih dekat dengan paman dari fihak ibu, maka sebaiknya ditunjuklah paman dari fihak ibu untuk menjadi wali. Akan tetapi jika dirasakan anak lebih dekat dengan paman dari fihak ayah, maka sebaiknya dialah yang ditunjuk sebagai wali.

Jika dari keluarga atau kerabat si anak sudah tidak mungkin lagi untuk ditunjuk sebagai wali, maka wali dapat ditunjuk dari orang luar kerabat yang dipandang dapat menjadi wali dengan baik. Mereka yang dapat menjadi wali dengan baik itu antara lain: Kepala Dusun, Kepala Desa dan sebagainya. Selanjutnya jika upaya di atas ternyata menemui jalan buntu sehingga tidak berhasil menunjuk wali, maka sebagai upaya terakhir adalah penunjukkan wali melalui keputusan hakim.

## 2). Pada masyarakat Patrilineal

Dalam masyarakat yang bersifat patrilineal seperti di Batak, Gayo dan lain-lain, kedudukan suami lebih dominan jika dibanding dengan istri. Hal ini karena pengaruh bentuk perkawinan yang mereka lakukan. Biasanya dalam masyarakat yang bersifat patrilineal bentuk perkawinan yang dilaksanakan adalah

perkawinan dengan pembayaran jujur dari fihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita. Adapun fungsi jujur adalah sebagai wujud pembelian calon mempelai wanita. Sebagai konsekuensinya yaitu fihak istri pindah ke dalam anggota clan suaminya. Anak laki-laki maupun wanita yang belum kawin menjadi anggota clan ayah. Bagi anak laki-laki berkedudukan sebagai penerus keturunan. Hubungan antara paman dengan kemenakan erat. Begitu juga hubungan sesama kemenakan tampak erat. Mereka saling mengenal dan kerja sama dalam suatu wadah (kelompok) keluarga besar (Extended family). Dengan demikian semangat kebersamaan kelompok sangat kuat, baik suka maupun duka. Atas dasar pemikiran yang demikian itu, maka hal itu berpengaruh juga dalam pemeliharaan anak (perwalian) dan penunjukkan wali.

Clan ayah beranggotakan:

- a. suami (ayah)
- b. istri (ibu)
- c. anak laki-laki dan anak keturunannya
- d. anak wanita yang belum kawin
- e. saudara laki-laki dari fihak ayah serta anak keturunannya

Pada masyarakat patrilineal, jika hanya salah satu orang tua meninggal dunia, maka kekuasaan anak masih tetap di tangan orang tua yang hidup terlama. Akan tetapi jika kedudukan orang tua meninggal dunia, maka barulah perwalian muncul.

Tentang orang yang dapat di-

tunjuk sebagai wali yaitu: kakak, kakek dari fihak ayah dan paman dari fihak ayah. Dalam penunjukkan wali tak pernah mengalami kesulitan yang berarti. Hal ini karena pola berfikir dan semangat kebersamaan kelompok masih kuat.

## 3). Pada masyarakat Matrilineal

Pada masyarakat Matrilineal seperti di Minangkabau garis keturunannya berdasarkan keturunan wanita. Bentuk perkawinan yang biasa dilaksanakan adalah perkawinan semenda (tanpa pembayaran jujur). Sebagai akibat hukum dari perkawinan semenda adalah sebagai berikut:

- a. suami maupun istri tetap sebagai anggota clannya masing-masing
- b. anak laki maupun wanita menjadi anggota dan penerus garis keturunan clan ibu
- c. hubungan antara paman dengan kemenakan dan sesama kemenakan dari fihak ibu adalah erat
- d. ayah secara formal tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya.

Pemeliharaan anak dalam masyarakat matrilineal bukan tanggung jawab ayah, tetapi merupakan tanggung jawab clan ibu. Ayah dalam hal ini sebagai orang luar yang hanya membantu pekerjaan istri.

Berdasarkan pola pikir yang demikian itu, maka jika terjadi perceraian ataupun karena salah satu dari orang tua yang meninggal dunia, maka kekuasaan untuk memelihara anak tetap ada pada ibu dengan bantuan kerabatnya. Perwali-

an baru muncul, jika kedua orang tua meninggal dunia.

Orang yang dapat ditunjuk sebagai wali dalam hal ini yaitu: kakak, paman fihak ibu dan kakek dari fihak ibu. Dalam penunjukan wali pada masyarakat matrilineal jarang terjadi kesulitan. Hal ini karena semangat kebersamaan kelompok sangat kuat. Selain itu pemeliharaan anak bukan hanya tanggung jawab dari orang tua, tetapi merupakan tanggung jawab clan ibu.

Jika kita bandingkan dalam hal orang yang dapat ditunjuk sebagai wali, maka terdapat persamaan dan perbedaan. Letak persamaannya yaitu baik Undang-undang nomor 1 tahun 1974 maupun ketentuan hukum adat menyebutkan bahwa orang yang dapat ditunjuk sebagai wali diutamakan dari keluarga/kerabat si anak. Mereka adalah: kakak, kakek, paman dan seterusnya. Letak perbedaannya yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 hanya menentukan bahwa orang yang dapat ditunjuk sebagai wali diutamakan dari keluarga si anak tanpa perincian lebih lanjut. Dalam ketentuan hukum adat, orang yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah orang yang masih ada hubungan darah. Dalam hal ini disesuaikan dengan sistem kemasyarakatan yang ada. Pada masyarakat parental, mereka yang ditunjuk sebagai wali adalah kakak, kakek-nenek dari fihak ayah/ibu, paman dari fihak ayah dan ibu. Pada masyarakat patrilineal adalah kakak, kakek dan paman dari fihak ayah dan pada ma-

sarakat matrilineal adalah kakak, kakek dan paman dari fihak ibu.

## 5. Kewajiban dan Tanggung Jawab Wali

### a. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974

Kewajiban dan tanggung jawab seorang wali menurut ketentuan ini memang berat. Sebagai yang telah ditentukan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### 1). Pasal 51 ayat 3:

"Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan hormat menghormati agama anak dan kepercayaan anak".

#### 2). Pasal 51 ayat 4:

"Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu mulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu".

#### 3). Pasal 54:

"Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut, dengan keputusan pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut".

### b. Menurut ketentuan hukum adat

Seperti ketentuan dalam Un-

dang-undang nomor 1 tahun 1974, wali mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang berat. Begitu juga dalam ketentuan hukum adat, wali mempunyai tanggung jawab tidak ringan. Hal ini karena wali diwajibkan juga untuk memelihara dan mengurus anak yang berada di bawah kekuasaannya dengan sebaik mungkin termasuk harta benda yang dimilikinya. Bahkan:

Setiap orang yang bertindak sebagai wali dari si anak bertanggung jawab terhadap si anak dan kerabatnya, jika wali itu melalaikan dan merugikan si anak, ia dapat digugat si anak atau oleh kerabat di hadapan pengadilan adat. Atau pun pengadilan negara" (Hilman Hadikusuma, 1987: 90)

Jika dibandingkan antara Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan ketentuan hukum adat, tentang kewajiban wali, maka terdapat persamaan dan perbedaan. Ada pun persamaannya adalah kewajiban untuk menjalankan tugas sebagai wali dengan sebaik-baiknya. Selain itu wali juga bertanggung jawab atas segala kerugian bagi anak dan harta bendanya, jika kerugian itu akibat dari kelalaiannya dalam menjalankan tugas. Sedangkan perbedaan yang ada yaitu dalam ketentuan hukum adat wali tidak ada kewajiban untuk membuat daftar harta benda si anak dengan segala perubahan yang terjadi atas harta benda itu. Hal karena sesama anggota masyarakat masih saling mengenal dan semangat kebersamaan kelompok masih kuat. Mereka tidak mampu-

nyai pamrih pribadi, tetapi yang diutamakan adalah kepentingan kelompok/masyarakat.

Dalam perkembangannya, sebagai akibat dari kemajuan di berbagai bidang seperti transportasi, komunikasi, pendidikan dan sebagainya, berpengaruh juga terhadap sistem kemasyarakatan yang ada. Terutama di kota-kota besar, cenderung terjadi pemecahan dari keluarga besar yang hidup dalam suatu kelompok, menjadi suatu keluarga-keluarga inti yang hidup memisahkan diri dari kelompok.

Dengan tumbuhnya suatu keluarga-keluarga inti dan didorong juga oleh sifat terbuka dari masyarakat, maka dalam suatu masyarakat tidak lagi dihuni oleh sekelompok orang yang masih dalam satu ras atau suku tertentu. Akan tetapi suatu masyarakat mulai dihuni oleh sekelompok orang yang berasal dari berbagai suku dan agama sehingga bersifat heterogin.

Dengan adanya perubahan dalam sistem kemasyarakatan itu, maka dalam lembaga hukum perwalian pun mengalami perubahan. Contoh dalam hal pengawasan tugas wali oleh sesama anggota masyarakat, tokoh masyarakat dan kepala masyarakat dirasa sudah kurang efektif lagi. Oleh karena itu agar tugas perwalian dapat berjalan dengan baik dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, maka undang-undang nomor 1 tahun 1974 memuat ketentuan tentang kewajiban wali untuk melakukan pendaftaran atas harta anak yang berada di



bawah kekuasaannya termasuk perubahan atas harta benda anak itu. Dengan adanya perbedaan yang prinsip tentang kewajiban wali tersebut tidak berarti harus dipertentangkan. Akan tetapi hal itu justru menunjukkan adanya perubahan menuju kemajuan dan kepastian hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

## 6. Hak Wali

### a. Menurut ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974

Kewajiban dan tanggung jawab seorang wali memang tidak ringan, karena wali dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Wali tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada di bawah kekuasaannya, tanpa alasan yang dapat diterima oleh masyarakat. Pembatasan gerak yang demikian ketat itu, diperlunak oleh Undang-undang dengan memberikan hak kepada wali. Sebagai yang telah diatur dalam pasal 52 juncto 48 bahwa "Jika kepentingan si anak menghendaki, maka wali diberi hak untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak yang berada di bawah kekuasaannya.

### b. Menurut ketentuan hukum adat

Dalam hukum adat hak wali dibedakan yaitu hak wali terhadap anak dan hak wali terhadap harta benda anak.

#### 1). Hak wali terhadap anak

Sebagai seorang yang lebih tua

dan diberikan kekuasaan untuk mengurus anak, wali berhak untuk dihormati dan ditaati oleh anak yang berada di bawah kekuasaannya. Sebagai realisasi dari hak wali dalam kehidupan sehari-hari yaitu wali berhak untuk menyuruh anak agar turut serta bekerja/menyelesaikan pekerjaan tertentu. Sebagai contoh adalah membantu menyelesaikan pekerjaan di rumah, di sawah, di toko dan sebagainya. Dalam rangka memberikan bimbingan dan pengarahan kepada anak, wali berhak untuk menegur dan menasihati anak agar menjadi anak yang bermoral baik.

#### 2). Hak wali terhadap harta benda anak

Di dalam hukum adat anak yang berada di bawah perwalian ada yang mempunyai harta benda dan ada anak yang tidak mempunyai harta benda. Terhadap perwalian atas anak yang mempunyai harta benda wali berhak untuk mengurus harta benda anak dengan baik. Jika kepentingan anak menghendaki maka wali berhak untuk menjual, menukarkan atau menggadaikan harta benda anak.

Kalau kita bandingkan antara hak wali menurut ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan ketentuan hukum adat, tampak ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu keduanya memberikan hak kepada wali untuk mengalihkan harta benda anak, asal demi kepentingan si anak. Sedangkan perbedaannya yaitu ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun

1974 hanya menjelaskan hak wali terhadap anak. Pada hal hak wali dalam ketentuan hukum adat, dua yaitu hak wali terhadap harta benda si anak dan hak wali terhadap anak itu sendiri. Dan yang penting justru hak terhadap anak, karena dalam hukum adat umumnya anak yang berada di bawah perwalian adalah anak yang tidak punya harta.

Perbedaan hak wali tersebut tidak perlu dipertentangkan. Hal itu adalah wajar, sebab tidak ada Undang-undang yang sempurna. Selain itu materi yang diatur dalam Undang-undang hanyalah hal-hal yang dirasa perlu saja. Sedangkan selebihnya diatur di dalam hukum tidak tertulis atau hukum adat. Dengan demikian antara ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan hukum adat saling melengkapi.

## 7. Berakhirnya Tugas Perwalian

Menurut ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ada beberapa sebab yang mengakibatkan tugas perwalian berakhir. Hal itu dapat disimpulkan dari pasal 49, bahwa perwalian berakhir karena ada pencabutan kekuasaan oleh keputusan hakim, atas gugatan yang diajukan oleh keluarga si anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung atau pejabat yang berwenang. Adapun alasan untuk melakukakan gugatan yaitu wali sangat melalaikan kewajibannya atau wali berkelakuan buruk sekali. Selain itu perwalian juga dapat berakhir demi hukum yaitu karena anak menjadi dewasa atau telah berumur 18 ta-

hun, anak melangsungkan perkawinan, anak kembali kepada orang tua berhubung kekuasaannya telah dipulihkan oleh keputusan hakim.

Dalam ketentuan hukum adat tugas perwalian dapat berakhir karena:

- a). anak menjadi dewasa, sehingga dapat mengurus diri sendiri dan harta benda yang dimilikinya
- b). anak melangsungkan perkawinan
- c). anak meninggal dunia
- d). anak ikut wali lain
- e). wali meninggal dunia

Jika diamati dalam hal berakhirnya tugas perwalian, maka antara ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan ketentuan hukum adat adalah sama. Hal itu, karena Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dibuat atas dasar bahan-bahan yang diambil dari nilai-nilai yang hidup pada masyarakat Indonesia yaitu hukum adat. Selain itu dengan sifat terbuka dari masyarakat, maka ada unsur-unsur dari luar sebagai pelengkap, sehingga ketentuan perwalian dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

## III. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Dari sajian tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan:

- a. Sampai saat ini pengertian lembaga hukum perwalian belum ada kesatuan pendapat, tetapi semua itu mempunyai makna yang sama yaitu memelihara

anak atau mengurus anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, termasuk juga terhadap harta benda anak tersebut.

- b. Sejak Undang-undang nomor 1 tahun 1974 diundangkan berarti keberadaan lembaga hukum perwalian di Indonesia lebih terjamin. Akan tetapi karena Undang-undang nomor 1 tahun 1974 hanya memuat masalah perwalian secara global dan singkat. Oleh karena itu keberadaan perwalian dalam hukum adat tetap diperlukan.
- c. Ada persamaan dan perbedaan tentang ketentuan lembaga hukum perwalian, menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan hukum adat. Adapun latar-belakang persamaan itu karena Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dibuat atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum adat. Dengan demikian ketentuan perwalian menurut Un-

dang-undang nomor 1 tahun 1974 telah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mewajibkan seorang wali untuk membuat daftar harta benda anak dengan segala perubahannya. Pada hal dalam hukum adat tidak ada kewajiban bagi wali untuk membuat daftar harta benda anak. Perbedaan itu bukanlah suatu hal yang bertenangan, tetapi justru untuk menyempurnakan ketentuan yang ada dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

## 2. Saran

- a. Perlu diadakan penelitian lapangan tentang lembaga hukum perwalian agar dapat diketahui kekurangan dan kelebihanannya.
- b. Untuk lebih memasyarakatkan lembaga hukum perwalian ini, maka perlu dilaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Djojodigono, *Asas<sup>2</sup> Hukum Adat Jilid 2*, Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Jogjakarta, 1957-1958.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Kerabatan Adat*, Alumni, Bandung, 1987.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa*

*Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Soekanto, Soerjono, dan Taneko Soleman B, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1981.

Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1971.

Ter Haar, Bzn. B, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.